

**ANALISIS KINERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KONAWA DALAM
MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH**

Muhammad Kemal Hayat

NPP. 32.0941

Asdaf Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: 32.0941@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dedi Kusmana, S.Sos., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *One of the main problems that occurs in Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province is the high level of poverty. Furthermore, the strategy carried out by local governments to reduce poverty rates is through the empowerment of micro, small and medium enterprises (UMKM), which are important pillars in encouraging local economic growth. However, the extent of the performance of the Konawe Regency Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade Office (Diskoperindag) in carrying out this strategic role has not been studied in depth. The gap in this research is found in the lack of research that specifically analyzes institutional performance in the context of empowering UMKM as an instrument to reduce poverty in Konawe Regency.* **Purpose:** *This study aims to analyze the performance of the Konawe Regency Diskoperindag in reducing poverty rates through the empowerment of UMKM.* **Method:** *This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of interviews, documentation, and observation. The research informants consist of officials of related agencies, UMKM actors, and parties directly related to the empowerment program.* **Result:** *The results of the study show that the performance of the Konawe Regency Diskoperindag has shown positive efforts through various programs such as entrepreneurship training, capital facilitation, and business assistance. However, the effectiveness of the program is still constrained by a number of factors, including limited human resources and budget, low active participation of UMKM actors, and weak synergy between agencies. . In addition, there are still challenges in terms of UMKM data collection and periodic program evaluation.* **Conclusion:** *although the Diskoperindag has shown quite good performance in empowering UMKM, it needs to be improved in terms of planning, coordination, and evaluation so that the programs carried out really have an impact on reducing poverty rates significantly.*

Keywords: *Performance, Empowerment, UMKM, Poverty, Diskoperindag Konawe Regency*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Salah satu permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Selanjutnya strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan adalah melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, sejauh mana kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Konawe dalam menjalankan peran strategis ini belum banyak dikaji secara mendalam. Adapun kesenjangan dalam penelitian ini terdapat pada masih kurangnya penelitian yang secara khusus menganalisis kinerja institusional dalam konteks pemberdayaan UMKM sebagai instrumen penurunan kemiskinan di Kabupaten Konawe

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Diskoperindag Kabupaten Konawe dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat dinas terkait, pelaku UMKM, serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan program pemberdayaan.. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Diskoperindag Kabupaten Konawe telah menunjukkan upaya positif melalui berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitasi permodalan, dan pendampingan usaha. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan SDM dan anggaran, rendahnya partisipasi aktif pelaku UMKM, serta lemahnya sinergi antar instansi. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam hal pendataan UMKM dan evaluasi program secara berkala. **Kesimpulan:** meskipun Diskoperindag telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam memberdayakan UMKM, namun perlu peningkatan dari sisi perencanaan, koordinasi, dan evaluasi agar program yang dijalankan benar-benar berdampak pada penurunan angka kemiskinan secara signifikan.

Kata kunci: Kinerja, Pemberdayaan, UMKM, Kemiskinan, Diskoperindag, Kabupaten Konawe

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma baru pemerintahan dibangun dengan berdasarkan pada kultur kekuasaan, ekonomi, dan sosial sebagai suatu rangkaian sistematis yang saling mengikat dan tergantung, mencerminkan pemerintahan yang baik (Labolo, 2021). Menurut (Jeddawi, 2009) Pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pelayanan publik, dalam sejumlah kasus justru menampakkan kondisi yang sebaliknya. Kewenangan yang besar ditafsirkan masing-masing daerah, sebagai kewenangan untuk melahirkan kebijakan dengan arah peningkatan pendapatan daerah. Kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, seperti pangan, sandang, dan papan. Rendahnya pendapatan ini juga berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Kondisi masyarakat yang dianggap miskin dapat dilihat dari seberapa besar kemampuan mereka dalam memenuhi standar hidup. Standar hidup di suatu masyarakat hanya mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga kesehatan dan pendidikan. Tempat tinggal yang layak juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, suatu masyarakat dikatakan miskin jika pendapatan mereka jauh di bawah rata-rata, yang mengakibatkan terbatasnya kesempatan untuk mencapai kesejahteraan. (Rahman et al., 2019)

Berdasarkan data BPS Konawe Tahun 2023 jelas menunjukkan terjadinya fluktuasi presentase penduduk miskin dari tahun 2019-2023. Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir presentase tertinggi penduduk miskin berturut-turut pada tahun 2021 dan 2023 sebesar 13,03% dan 13,02%. Sedangkan presentase terendah penduduk miskin yaitu pada tahun 2020 sebesar 12,2%. (BPS Konawe, 2024)

Kabupaten Konawe, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, masih menghadapi tantangan besar dalam penurunan angka kemiskinan. Salah satu sektor yang dianggap dapat membantu mengurangi kemiskinan adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah karena tidak hanya menyerap banyak tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu strategi utama dalam mengurangi kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM sangat bergantung pada efektivitas kinerja dinas terkait dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta program yang mendukung pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe dalam menjalankan tugasnya untuk memberdayakan UMKM sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya peran UMKM dalam menurunkan angka kemiskinan di berbagai daerah. Beberapa studi menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, penelitian oleh (Rachmawati et al., 2021) menekankan bahwa strategi pelatihan dan pendampingan UMKM secara intensif mampu meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan pelaku UMKM. Selain itu, studi oleh (Hilmiyah et al., 2022) menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM menjadi kunci dalam mengatasi kendala permodalan dan pemasaran.

Namun, terdapat kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, di mana belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM, khususnya di tingkat kabupaten seperti Kabupaten Konawe. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada peran UMKM itu sendiri atau membahas aspek permodalan dan pelatihan secara umum, tanpa mengulas secara mendalam bagaimana kinerja instansi pemerintah sebagai fasilitator dan pelaksana program pemberdayaan.

Selain itu, terdapat kekosongan data empiris mengenai efektivitas program-program yang dijalankan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dalam jangka waktu tertentu, baik dari segi output (jumlah UMKM yang dibina), outcome (peningkatan kesejahteraan pelaku usaha), maupun impact (penurunan angka kemiskinan). Hal ini menciptakan kebutuhan akan kajian yang lebih komprehensif dan kontekstual guna memberikan gambaran nyata tentang efektivitas kinerja institusi tersebut di daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan UMKM maupun konteks kemiskinan. Penelitian Sutriyanana dan Basori berjudul *Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi* (Dzulqarnain et al., 2022), menemukan bahwa kinerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi dalam upaya menurunkan kemiskinan melalui program “Sukabumi Kece” menunjukkan bahwa implementasi program tersebut belum optimal dalam mengatasi kemiskinan di Kota Sukabumi. Penelitian Junari menemukan bahwa efektivitas dinas perindustrian dalam memberdayakan Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap kesejahteraan pelaku usaha di Kota Mataram dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari adanya program perlindungan, pendaftaran serta sertifikasi yang memang sangat dibutuhkan oleh para pelaku IKM. Selain itu, bantuan seperti mesin kopi, peralatan bor, dan perlengkapan lainnya yang mendukung usaha mereka juga dapat membantu meningkatkan perekonomian IKM di Kota Mataram (Junari, 2021). Penelitian Pradityo selanjutnya berkaitan dengan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta dalam mewujudkan program penguatan pasa di bidang industri kecil dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Disperindag Kota Surakarta dalam mewujudkan program penguatan pasar di sektor Industri Kecil Menengah dapat dianggap baik, berdasarkan keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Selain itu, pengukuran efektivitas juga menunjukkan hasil yang positif dari segi responsivitas dan akuntabilitas. (Pradityo,

2011). Berdasarkan hasil penelitian Maria tentang efektifitas peran strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM. Ditemukan bahwa program belum efektif karena kendala internal seperti keterbatasan anggaran dan eksternal seperti rendahnya semangat kewirausahaan serta pemasaran produk lokal (Tia et al., 2024) . Selanjutnya dalam penelitian Poli dan Pangemanan menunjukkan bahwa produktivitas kinerja dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Selatan berjalan baik, namun terdapat kendala seperti dampak pandemi COVID-19 dan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana (Polii et al., 2023). Kemudian dalam penelitian Arip dkk menyimpulkan bahwa Pengaruh Idealitas dan Stimulasi Intelektual memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Ini menunjukkan bahwa pemimpin yang dapat menjadi panutan dan menginspirasi tim mereka memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan produktivitas dan kesuksesan UMKM. Selanjutnya, pemimpin yang mendorong kreativitas, inovasi, dan pemikiran kritis di antara anggota tim dapat meningkatkan kinerja UMKM. (Arip et al., 2025)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam kajian kebijakan publik dan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam konteks pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai strategi penurunan angka kemiskinan. Kebaruan terletak pada fokus analisis terhadap kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur akademik. Penelitian ini memberikan kebaruan ilmiah dalam konteks analisis kinerja instansi pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menilai efektivitas program pemberdayaan secara umum atau terbatas pada aspek ekonomi UMKM, penelitian ini secara spesifik mengaitkan kinerja organisasi publik dengan dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan. Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan metode kualitatif deskriptif berbasis data primer dari wawancara mendalam dan dokumentasi lapangan yang dikombinasikan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang strategi, kendala, serta capaian program pemberdayaan UMKM di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan analisis faktor-faktor internal (seperti sumber daya, kepemimpinan, dan perencanaan program) dan eksternal (seperti dukungan kebijakan dan kondisi ekonomi masyarakat) yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan berbasis UMKM serta menjadi masukan kebijakan yang aplikatif dan kontekstual.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan model pendekatan Miles dan huberman analisis data terjadi sepanjang proses pengumpulan data dan juga setelahnya dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengkategorikan analisis data yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Anwar Thalib, 2022). Dalam (Simangunsong, 2016) , menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat fleksibel, memungkinkan desain penelitian disesuaikan fenomena yang muncul di lapangan. Peneliti mengambil metode ini

karena memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat menangkap makna, persepsi dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam dan menyeluruh bagaimana kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM. Pendekatan deskriptif dipilih karena mampu menggambarkan fakta, situasi, dan kondisi aktual di lapangan berdasarkan data empiris dari wawancara dan dokumentasi, tanpa menggunakan perhitungan statistik atau generalisasi angka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari sudut pandang langsung para pelaku, baik dari pihak instansi maupun pelaku UMKM, mengenai bagaimana program dijalankan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Pendekatan kualitatif deskriptif juga sesuai karena penelitian ini ingin menyoroti proses, mekanisme kerja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program pemberdayaan tersebut, bukan sekadar mengukur output numerik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang kaya, detail, dan kontekstual untuk menyajikan gambaran utuh tentang realitas di lapangan. Oleh karena itu, metode kualitatif deskriptif dianggap paling relevan dan efektif dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe, Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Kepala Seksi Usaha Koperasi dan UKM, serta masyarakat pelaku UMKM masing-masing sebanyak 3 informan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala dinas dikarenakan kepala dinas memiliki akses informasi menyeluruh terkait kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Disamping itu, kepala dinas sebagai pemegang otoritas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi pemberdayaan UMKM. Adapun penelitian ini dilaksanakan selama 21 hari dan berlokasi di Kabupaten Konawe pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe menggunakan teori Agus Dwiyanto (2006). Dalam teorinya, Dwiyanto menjelaskan bahwa kinerja organisasi publik tidak hanya diukur dari hasil akhir (output), tetapi juga dari proses pelayanan serta tanggung jawab institusi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Menurutnya, terdapat lima dimensi utama yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sektor publik, yaitu produktivitas, responsivitas, responsibilitas, kualitas layanan dan akuntabilitas. Dari kelima indikator, peneliti memilih dan memutuskan untuk menggunakan tiga indikator yaitu produktivitas, responibilitas, dan responsivitas. Ketiga indikator ini dipilih oleh peneliti dikarenakan ketiga indikator ini telah mampu mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan dalam menilai suatu kinerja organisasi dari dalam hingga luar.

Dimensi produktifitas merujuk pada kemampuan instansi dalam menghasilkan output yang maksimal dengan sumber daya yang ada. Dalam konteks ini, produktivitas Dinas Koperasi UKM Perindag Kabupaten Konawe terlihat dari pelaksanaan program hibah dana dan/atau peralatan yang telah disalurkan kepada pelaku UMKM sebagai upaya mendorong pertumbuhan usaha. Selanjutnya, kualitas pelayanan mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun kemudahan akses. Dinas ini telah berusaha memberikan pelayanan yang prima dengan menyederhanakan prosedur bantuan dan legalitas usaha.

Adapun responsivitas menggambarkan kemampuan dinas dalam merespons keluhan, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Responsivitas ini tampak dari langkah cepat dalam menanggapi kebutuhan legalitas usaha hingga penyediaan lokasi strategis bagi pedagang setelah adanya revitalisasi kawasan perkantoran. Sementara itu, tanggung jawab menunjukkan sejauh mana pelaksanaan program pemberdayaan dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dinas ini menjalankan program berdasarkan Peraturan Bupati dan aturan yang lebih tinggi untuk menjamin transparansi dan keadilan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Produktivitas

Produktivitas merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja organisasi publik, termasuk dalam upaya pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ini, produktivitas mencerminkan kemampuan dinas dalam melaksanakan tugas, pencapaian target, serta penyediaan sarana-prasarana yang mendukung perkembangan UMKM. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

Pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah oleh pemerintah Kabupaten Konawe untuk mengurangi angka kemiskinan harus mempertimbangkan sejauh mana produktivitas yang tercapai, meliputi kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan, pencapaian target yang ditetapkan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan, berbagai tantangan dihadapi disperindag dalam upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Konawe. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sesi Serlita, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas pada tanggal 8 Januari 2025, beliau menginformasikan sebagai berikut:

“Upaya Disperindag dalam mengembangkan UMKM menunjukkan hal yang positif, meskipun masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk memastikan UMKM di konawe dapat lebih berkembang. Kita memiliki tiga tantangan utama dalam pengembangan UMKM di konawe ini, yang pertama kurangnya akses terhadap modal. Kemudian keterbatasan dalam hal teknologi dan keterbatasan pasar”

Meskipun target numerik (seperti jumlah UMKM yang dibantu atau pertumbuhan omzet) tidak disebutkan secara spesifik, namun berdasarkan informasi dari kepala dinas, terdapat tiga tantangan utama yang menjadi penghambat pencapaian produktivitas maksimal, yaitu: akses terhadap modal, keterbatasan teknologi, dan keterbatasan akses pasar. Program-program ini menunjukkan bahwa dinas tidak hanya sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan dasar pelaku UMKM dalam hal permodalan dan peralatan usaha. Ini menjadi indikator bahwa produktivitas kerja dinas diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Selanjutnya dalam dimensi produktivitas terdapat indikator kemampuan pelaksanaan pekerjaan. Sejalan dengan hal itu peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi & UKM Ibu Sri Susanti Enem, S.E., M.M. pada tanggal 8 Januari 2025 beliau menyampaikan mengenai kinerja dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan tugas dinas telah menyalurkan berbagai dukungan dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe kepada pelaku UMKM di konawe. Adapun bentuk bantuan itu berupa program bantuan dana/atau peralatan hibah bagi kelompok UMKM. Tentunya dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat merangsang rasio pertumbuhan jumlah pelaku UMKM”

Kemudian dalam dimensi produktivitas terdapat indikator kelengkapan/penyediaan sarana dan prasarana. Indikator ketiga adalah ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana yang menjadi pendukung utama kegiatan usaha. Dalam hal ini, pemerintah telah membangun fasilitas berupa

kawasan pusat kuliner atau food court untuk merelokasi pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di sekitar kantor bupati. Sejalan dengan hal itu wawancara dilakukan dengan Bapak Masnur, S.Sos., M.M. selaku Kepala Seksi Usaha Koperasi & UKM. pada tanggal 10 Januari 2025, beliau menyampaikan mengenai kelengkapan sarana dan prasarana UMKM sebagai berikut:

“iya jadi kawasan ini adalah sebagai tempat untuk menampung para pelaku UMKM. Pemerintah menyediakan sarana ini dan sudah rampung di tahun 2024. Sebelumnya mereka itu berjualan di depan kantor bupati tapi pemkab merevitalisasi kawasan itu dan memindahkan penjual di tempat food court yang baru. Tujuannya bagus biar terpusat dan biar teratur tidak semrawut, makanya disediakan tempatnya.”

Pembangunan kawasan ini menunjukkan adanya intervensi struktural untuk menertibkan aktivitas usaha kecil sembari memberikan ruang usaha yang layak, higienis, dan tertata. Langkah ini tidak hanya berdampak pada estetika tata kota, tetapi juga meningkatkan citra dan daya saing usaha mikro, terutama dalam sektor kuliner.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan terkait produktivitas dapat disimpulkan bahwa kinerja dinas koperasi usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan telah melakukan usaha dan tindakan positif terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Konawe. Hal ini dibuktikan dengan usaha terstruktur dan sistematis yang telah dilakukan seluruh stakeholder dalam upaya memberikan kemudahan bantuan program hibah dana dan/atau peralatan dalam rangka pemberdayaan UMKM.

3.2. Responsivitas

Responsivitas seperti yang kita ketahui adalah kemampuan pihak pemerintah dalam merespon keluhan dan aduan masyarakat serta keselarasan program dari pemerintah kepada masyarakat akan sangat berpengaruh dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil menengah secara maksimal. Indikator pertama dalam responsivitas adalah bagaimana pemerintah merespon keluhan atau kendala yang dihadapi masyarakat. Hal ini terlihat dari pernyataan PLT. Kepala Dinas, Ibu Sesi Serlita, S.H., M.H., yang menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang bingung mengenai prosedur pendaftaran usaha, khususnya dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Menanggapi hal tersebut, dinas langsung memberikan penjelasan dan pendampingan secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh Ibu Kadis Sesi Serlita, S.H., M.H. pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2025 beliau mengatakan bahwa:

“ada beberapa masyarakat disini yang masih bingung tentang prosedur pendaftaran usaha mereka. Oleh karena itu kami langsung merespon tentang bagaimana cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Tujuannya adalah agar legalitas usaha mereka jelas”

Hal ini menunjukkan bahwa dinas memiliki kesadaran tinggi untuk memastikan bahwa pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya secara legal dan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam dimensi responsivitas terdapat indikator merespon tantangan. Indikator kedua adalah kemampuan pemerintah dalam menghadapi tantangan atau dinamika sosial yang muncul. Salah satu tantangan yang muncul di Kabupaten Konawe adalah proyek revitalisasi kawasan perkantoran bupati, yang berdampak pada para pedagang yang sebelumnya berjualan di sekitar area tersebut. Sebagai bentuk solusi, dinas mendorong pembangunan kawasan wisata kuliner untuk menampung para pedagang agar tetap dapat berjualan secara teratur dan tertib. Sejalan dengan hal itu wawancara dilakukan dengan Bapak Masnur S.Sos., M.M sebagai Kepala Seksi Usaha Koperasi & UKM pada tanggal 10 Januari 2025 menyampaikan mengenai kemampuan merespon tantangan sebagai berikut:

“tantangan yang ada yaitu revitalisasi kawasan perkantoran bupati yang disana banyak penjual. Makanya dibangun kawasan wisata kuliner yang akan menampung semua penjual di depan

kantor bupati itu. Walaupun belum beroperasi setidaknya tempatnya sudah ada tinggal menunggu diresmikan bupati saja”

Langkah ini menunjukkan kemampuan dinas untuk merespon perubahan kondisi fisik wilayah dengan solusi jangka panjang yang tetap mendukung keberlangsungan usaha mikro masyarakat. Respon cepat terhadap kebutuhan dan keluhan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi bentuk responsivitas dinas terhadap kondisi riil yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan usaha kecil dan menengah.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan salah satu masyarakat penerima bantuan hibah Bapak Tula pada tanggal 10 Januari 2024, beliau menyampaikan bahwa:

“saya sangat merasa terbantu melalui bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe, sebagai pelaku UMKM bantuan ini baru pertama kali saya dapat. Tentunya saya berharap bantuan ini dapat terus meningkat tiap tahunnya”

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat pelaku UMKM informan kedua pelaku UMKM yang mendapat bantuan dana Bapak Madan pada tanggal 10 Januari 2024, beliau menyampaikan bahwa:

“kalau saya memang baru pertama kali mendapatkan bantuan ini. Saya sangat bersyukur dan juga merasa terbantu oleh pemerintah kabupaten konawe apalagi hitungannya usaha saya ini masih baru dan tahap berkembang. Untuk harapan kedepan saya harap pemerintah daerah dapat lebih kasih perhatian kepada kami para pelaku usaha kecil”

Tanggapan ini menunjukkan bahwa program dinas telah menasar kelompok sasaran yang tepat, namun keberlanjutan dan peningkatan jumlah bantuan menjadi harapan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe telah mengambil langkah yang tepat yaitu dengan membangun kawasan wisata kuliner. Tujuannya adalah untuk memusatkan para pedagang agar berjualan di satu tempat yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan mengingat proyek revitalisasi kawasan perkantoran bupati konawe yang sedang berlangsung. Disamping itu keberadaan pedagang disekitar jalan depan kantor bupati mengganggu aktivitas kendaraan bermotor karena pedagang berjualan di bahu jalan dan kawasan perkantoran yang juga dijadikan pusat olahraga masyarakat menjadi terganggu. Penertiban pedagang ini adalah salah satu langkah tepat untuk menertibkan kawasan perkantoran bupati konawe atau yang lebih dikenal Inolobungadue Central Park.

3.3. Responsibitas

Responsibilitas menjadi prioritas oleh pemerintah Kabupaten Konawe dalam bekerja dimana seluruh pelaksanaan tugas harus sesuai dan mengacu pada ketentuan dan aturan. Responsibilitas adalah komitmen pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, dimensi ini mencakup kepatuhan terhadap prosedur, kejelasan persyaratan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program. PLT. Kepala Dinas menyampaikan bahwa semua pelaksanaan tugas dalam instansinya dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe dan regulasi di atasnya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan wawancara dengan PLT. Kepala Dinas Ibu Sesi Serlita, S.H., M.H. pada tanggal 8 Januari 2025, beliau menyampaikan:

“aturan yang mengatur jelas, kita menjalankan tupoksi sesuai peraturan Bupati Konawe dan peraturan di atasnya. Kalau kita taat aturan maka aturan akan menjaga kita, dan segala bentuk penyelewengan atau manipulasi curi-curri akan ada sanksi yang menunggu ”

Selanjutnya dalam pelayanan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah khususnya dalam persyaratan bagi penerima bantuan dana/atau peralatan penguatan struktur permodalan bagi kelompok

pelaku usaha mikro kecil menengah terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kepala Seksi Usaha Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima bantuan, seperti legalitas usaha (NIB), belum pernah menerima bantuan serupa, serta memiliki KTP dan rekening aktif. Hal ini penting untuk menjamin bantuan diberikan secara tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Seksi Usaha Koperasi dan UKM Bapak Masnur, S.Sos., M.M. berdasarkan wawancara pada tanggal 8 Januari 2025, sebagai berikut:

“ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi pelaku UMKM sebagai persyaratan penerima program bantuan. Diantaranya memiliki rintisan usaha yang mempunyai potensi mengembangkan usaha yang diperkuat NIB. Kemudian belum pernah menerima bantuan dana yang sejenis sebelumnya, selanjutnya memiliki KTP dan rekening tabungan Bank Sultra yang masih aktif.”

Bentuk tanggung jawab dinas juga tercermin dalam kepuasan masyarakat atas bantuan yang diberikan. Masyarakat menyadari bahwa keberadaan bantuan adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mendukung penguatan ekonomi lokal. Sejalan dengan hal itu peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Aswar sebagai informan ketiga masyarakat pelaku UMKM ketiga pada tanggal 10 Januari 2024, beliau menyampaikan bahwa:

“kami merasakan bantuan ini bisa dibilang sangat berarti, karena pemerintah hadir dan memiliki tanggung jawab atas program pemberdayaan UMKM yang dijalankan ini”

Maka berdasarkan wawancara dan pengamatan dapat disimpulkan bahwa **responsibilitas** Diskoperindag Kabupaten Konawe sudah berjalan sesuai aturan, baik dari segi pelaksanaan tugas, penyaluran bantuan, hingga tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Namun, tetap diperlukan evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan daerah agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Pelatihan keterampilan, bantuan modal, serta fasilitasi pemasaran terbukti membantu pelaku usaha dalam mengembangkan kapasitas usahanya. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menekankan pada akses terhadap sumber daya produktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM sangat bergantung pada integritas antara pemerintah, pelaku usaha, dan faktor pendukung seperti digitalisasi dan layanan keuangan mikro. Secara teoritis, pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan terbukti meningkatkan efektivitas program dan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan pelaku UMKM. Program-program tersebut meliputi pelatihan keterampilan usaha, bantuan permodalan dalam bentuk hibah dana dan/atau peralatan, serta fasilitasi akses pasar melalui pembangunan kawasan usaha seperti sentra kuliner. Keberhasilan program ini secara langsung mengarah pada peningkatan produktivitas UMKM, penguatan daya saing pelaku usaha, serta mendorong masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya produktif, baik dalam bentuk modal, pengetahuan, maupun sarana produksi. (Suharto & Edi, 2015)

Hasil ini memperkuat teori pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikemukakan oleh (Suharto, 2005), yang menyatakan bahwa akses terhadap sumber daya produktif seperti modal, informasi, dan pasar menjadi kunci utama dalam mendorong masyarakat keluar dari lingkaran

kemiskinan. Ketika akses tersebut disediakan oleh pemerintah secara sistematis, maka proses pemberdayaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.

Sama halnya dengan dengan temuan penelitian oleh Nazaruddin bahwa integrasi antara digitalisasi dan layanan keuangan mikro dapat memperluas jangkauan dan efisiensi dalam pemberdayaan UMKM. (Nazaruddin et al., 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat membantu UMKM dalam mengakses layanan keuangan, memperluas pasar, dan meningkatkan produktivitas, meskipun diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Dalam penelitiannya, mereka menekankan bahwa adopsi teknologi digital, seperti platform pembayaran elektronik, e-commerce, dan sistem pencatatan keuangan digital, mampu meningkatkan efisiensi operasional serta mempermudah UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas secara geografis.

Temuan ini juga memperkuat penelitian sebelumnya oleh Rahayu & Puteri bahwa meskipun UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terdapat beberapa masalah dalam pengembangannya, termasuk yang berkaitan dengan inovasi dan teknologi hanya sekitar 30% atau 22 juta wirausaha UMKM yang telah memasuki ekosistem digital, serta tantangan dalam literasi digital, peningkatan produktivitas, masalah hukum atau perizinan, pembiayaan, pemasaran, sumber daya manusia, sertifikasi dan standarisasi, pendampingan dan pelatihan, serta pengelolaan basis data tunggal. Rahayu & Puteri juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan basis data tunggal UMKM, yang mengakibatkan ketidaktepatan dalam penyaluran program bantuan atau kebijakan pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar UMKM dapat bertransformasi menjadi pilar ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. (Rahayu & Puteri, 2024)

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Peindustrian dan Perdagangan dalam mengembangkan sektor UMKM telah menunjukkan upaya yang cukup baik melalui berbagai program strategi seperti fasilitasi akses permodalan, program bantuan dana/hibah serta peralatan, serta sarana dan prasarana. Namun demikian, implementasi program masih belum optimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, pendanaan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam proses pemberdayaan, dan kurangnya data UMKM yang valid dan terbaru. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan masih belum dilakukan secara maksimal, sehingga dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan belum dapat diukur secara signifikan. Oleh karena itu, peningkatan sinergi antar instansi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta inovasi kebijakan menjadi hal yang penting agar pemberdayaan UMKM dapat lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Konawe. Adapun terdapat faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Kabupaten Konawe. Faktor penghambat antara lain adalah sumber daya manusia, kurangnya akses terhadap modal, keterbatasan teknologi dan keterbatasan pasar. Sedangkan faktor pendukung diantaranya adalah kemitraan serta dukungan program pemerintah, dukungan infrastruktur, dukungan sosial dan komunitas lokal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga memiliki keterbatasan data primer menjadi tantangan utama karena pengumpulan informasi sangat bergantung pada wawancara dengan informan dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe serta pelaku UMKM. Tidak semua pihak yang relevan dapat diwawancarai secara mendalam akibat keterbatasan waktu, ketersediaan narasumber, serta akses terhadap data internal instansi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe khususnya Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Thalib, M. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya. *Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23–33. <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>
- Arip, Y., Hartono, S., Kristiyana, N., & Setiawan, F. (2025). Ideal Influence and Intellectual Stimulation: Critical Dimensions in Improving MSME Performance in the Digital Transformation Era. *E3S Web of Conferences*, 622. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202562204012>
- BPS Konawe. (2024). *Kabupaten Konawe Dalam Angka 2024*. 10.
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *PROFESSIONAL: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(1). <https://doi.org/10.37676/professional.v9i1.2505>
- Hilmiyah, A., Ramadhan, D. F. F., Sundari, D. D., & Darmawan, Y. (2022). Memanfaatkan Barang Bekas Untuk Membangun Kreativitas Dalam Masa Adaptasi Baru Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Peradaban Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.55182/jpm.v2i1.118>
- Jeddawi, M. (2009). Peranan Birokrasi Dalam Meningkatkan Daya Saing dan Investasi di Daerah. *Media Riset Bisnis & Manajemen*, 9(1). <https://doi.org/10.25105/mrbm.v9i1.1073>
- Junari. (2021). *Efektivitas Dinas Perindustrian Dalam Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha di Kota Mataram (Studi Kasus Dinas Perindustrian Kota Mataram)*.
- Labolo, M. (2021). Government policy in handling stunting and malnutrition in children during the COVID-19 pandemic. *Ayer Journal*, 28(1). <http://ayerjournal.com/index.php/ayer/article/view/160>
- Nazaruddin, I., Utami, E. R., & Rahmawati, E. (2024). Digitalization Challenges for SMEs: A Systematic Literature Review Perspective and Future Research. *JBTI : Jurnal Bisnis : Teori Dan Implementasi*, 15(1), 15–43. <https://doi.org/10.18196/jbti.v15i1.20410>
- Polii, R. G., Sambiran, S., & Pangemanan, S. E. (2023). *Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat (UKM)*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/48208>
- Pradityo, H. A. (2011). *Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surakarta Dalam Rangka Mewujudkan Penguatan Pasar di Bidang Industri Kecil dan Menengah*.
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., & Setiawan, R. (2021). Tingkat Kesadaran dan Kesiapan Pelaku Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2). <https://doi.org/10.20961/jab.v21i2.646>
- Rahayu, S. A. P., & Puteri, D. S. (2024). *Optimizing the Use of Online Single Submission to Accelerate Business Licensing For Micro Enterprises*. 7(1), 48. <https://doi.org/10.15294/jphi.v7i1.12371>

- Rahman, P. A., Firman, & Rusdinal. (2019). *Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi*. 3(6), 1542–1548. <https://doi.org/10.31004/jptam.v3i3.399>
- Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. In *Alfabeta*.
- Suharto, & Edi. (2015). PERAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI INDONESIA: STUDI KASUS PROGRAM KELUARGA HARAPAN. In 22 *Sosiohumaniora* (Vol. 17, Issue 1). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5668>
- Suharto, T. (2005). *Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat*.
- Tia, M. A., Mitan, W., & Lamawitak, P. L. (2024). Analisis Efektivitas Peranan Strategis Dinas Koperasi dan UKM dalam Upaya Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM di Kabupaten Sikka. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 1(4), 251–276. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i4.493>

